



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5759

KEUANGAN. OJK. Reksa Dana Syariah.  
Persyaratan. Penerbitan. (Penjelasan Atas  
Lembaran Negara Nomor 257 Tahun 2015 Nomor  
270).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19/POJK.04/2015

TENTANG

PENERBITAN DAN PERSYARATAN REKSA DANA SYARIAH

## I. UMUM

Dalam rangka pengembangan Pasar Modal syariah agar dapat tumbuh secara berkelanjutan diperlukan pengembangan infrastruktur yang memadai. Salah satu infrastruktur penting adalah tersedianya regulasi yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diterapkan.

Untuk mendukung pengembangan Pasar Modal syariah tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan sekaligus pemisahan ketentuan terkait dengan Reksa Dana Syariah sehingga sesuai dengan karakteristik dan pengelolaan atas Efek tersebut. Penyempurnaan dan pemisahan ketentuan ini diperlukan mengingat Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah dipandang terlalu umum karena mengatur penerbitan berbagai jenis Efek Syariah.

Adapun beberapa pokok penyempurnaan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah antara lain meliputi: pengaturan Reksa Dana Syariah berdasarkan jenisnya, relaksasi kebijakan investasi dalam satu portofolio Reksa Dana Syariah, kewajiban Manajer Investasi selaku pengelola Reksa Dana Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah, dan jenis Reksa Dana Syariah yang baru yaitu Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk dan Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan “penawaran umum di luar negeri” adalah penawaran umum Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara Efek tersebut ditawarkan.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran yang saat ini berlaku adalah Peraturan Nomor IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-690/BL/2011, tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi dapat terdiri dari 1 (satu) anggota yang ditunjuk oleh Direksi.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan “pengawasan Reksa Dana Syariah dalam rangka pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan” adalah pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang dilakukan sampai dengan dibubarkannya Reksa Dana Syariah.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “pihak yang dituju” adalah pihak yang menggunakan jasa Dewan Pengawas Syariah.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Huruf f**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran yang saat ini berlaku adalah Peraturan Nomor IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-690/BL/2011, tanggal 30 Desember

2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran. Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang saat ini berlaku adalah Peraturan Nomor IX.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-52/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Reksa Dana Berbentuk Perseroan lainnya yang saat ini berlaku antara lain:

1. Peraturan Nomor IV.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-13/PM/2002, tanggal 14 Agustus 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan; dan
2. Peraturan Nomor IV.A.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-14/PM/2002, tanggal 14 Agustus 2002 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

#### **Pasal 10**

**Cukup jelas.**

#### **Pasal 11**

##### **Ayat (1)**

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang saat ini berlaku adalah Peraturan Nomor IV.A.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-14/PM/2002, tanggal 14 Agustus 2002 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

##### **Ayat (2)**

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang saat ini berlaku adalah Peraturan Nomor IV.A.5, Lampiran Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-21/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Daftar Efek Syariah dan pihak penerbit Daftar Efek Syariah yang saat ini berlaku adalah Peraturan Nomor II.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-208/BL/2012 Tanggal 24 April 2012 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "Waran Syariah" adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham syariah dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

**Angka 6**

Cukup jelas.

**Angka 7**

Yang dimaksud dengan “surat berharga komersial syariah dalam negeri” antara lain adalah *Medium Term Note* syariah.

**Angka 8**

Cukup jelas.

**Angka 9**

Yang dimaksud dengan “Instrumen pasar uang syariah” antara lain seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Republik Indonesia” adalah Pemerintah Pusat.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang saat ini berlaku adalah Peraturan Nomor IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-430/BL/2007, tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum

**Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.**

**Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif lainnya antara lain:**

- 1. Peraturan Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-552/BL/2010, tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan**
- 2. Peraturan Nomor IV.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-553/BL/2010, tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.**

**Pasal 15**

**Ayat (1)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (2)**

**Cukup jelas.**

**Ayat (3)**

**Huruf a**

**Cukup jelas.**

**Huruf b**

**Cukup jelas.**

**Huruf c**

**Cukup jelas.**

**Huruf d**

**Dalam hal Pihak yang melakukan kegiatan syariah di Pasar Modal merupakan Kantor Cabang Bank Asing, yang dimaksud dengan “direksi” adalah pimpinan tertinggi pada Kantor Cabang Bank Asing tersebut.**

**Huruf e**

**Cukup jelas.**

**Huruf f**

**Cukup jelas.**

**Huruf g**

**Cukup jelas.**

**Ayat (4)**

**Cukup jelas.**

**Pasal 16**

**Cukup jelas.**

**Pasal 17**

**Cukup jelas.**

**Pasal 18**

**Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman pengumuman harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka yang saat ini berlaku adalah Peraturan Nomor IV.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-516/BL/2012, tanggal 21 September 2012 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.**

**Pasal 19**

**Huruf a**

**Contoh instrumen pasar uang syariah antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah.**

**Huruf b**

**Contoh Efek Syariah Berpendapatan Tetap antara lain sukuk ijarah.**

**Pasal 20**

**Cukup jelas.**

**Pasal 21**

**Cukup jelas.**

**Pasal 22**

**Cukup jelas.**



**Pasal 23**

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang saat ini berlaku adalah Peraturan Nomor IV.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-262/BL/2011, tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang saat ini berlaku adalah Peraturan Nomor IV.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-262/BL/2011, tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang saat ini berlaku adalah Peraturan Nomor IV.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-13/PM/2002, tanggal 14 Agustus 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang saat ini berlaku adalah Peraturan Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-552/BL/2010, tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang saat ini berlaku adalah Peraturan Nomor IV.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-13/PM/2002, tanggal 14 Agustus 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

**Pasal 36**

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Pengalaman telah melakukan pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) paling sedikit 3 (tiga) tahun antara lain dibuktikan dengan akta pendirian.

Angka 2

Infrastruktur yang memadai dalam melakukan pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dapat dibuktikan antara lain dengan jumlah sumber daya manusia yang mencukupi, sistem pengawasan yang memadai, dan prosedur operasi standar.

Angka 3

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Huruf a

Yang dimaksud dengan “likuid” antara lain adalah frekuensi transaksi Efek yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata frekuensi transaksi Efek sejenis misalnya saham dibandingkan dengan saham.

**Huruf b**

**Cukup jelas.**

**Pasal 41**

**Cukup jelas.**

**Pasal 42**

**Cukup jelas.**

**Pasal 43**

**Cukup jelas.**

**Pasal 44**

**Cukup jelas.**

**Pasal 45**

**Cukup jelas.**

**Pasal 46**

**Cukup jelas.**

**Pasal 47**

**Cukup jelas.**

**Pasal 48**

**Cukup jelas.**

**Pasal 49**

**Cukup jelas.**

**Pasal 50**

**Cukup jelas.**

**Pasal 51**

**Cukup jelas.**

**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Cukup jelas.

**Pasal 54**

Cukup jelas.

**Pasal 55**

Cukup jelas.

**Pasal 56**

Cukup jelas.

**Pasal 57**

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa memerintahkan Manajer Investasi untuk membubarkan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**Pasal 58**

Cukup jelas.

**Pasal 59**

Cukup jelas.

**Pasal 60**

Cukup jelas.

**Pasal 61**

Cukup jelas.

**Pasal 62**

Cukup jelas.

**Pasal 63**

Cukup jelas.